BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum¹ berlandaskan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang bersumber dari idiologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Oleh karenanya setiap aspek kehidupan warga atau dalam interaksinya dengan warga lainnya diatur oleh hukum dan sekaligus menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah antar warga, yakni mereka yang pada hakikatnya mendambakan hidup damai, aman dan sejahtera sebagaimana tujuan dari hidup bernegara itu sendiri.

Pada tatanan pembangunan ekonomi Indonesia yang bertumbuh menjadi negara maju, hukum memiliki peranan strategis dan signifikan untuk merencanakan, mengatur, dan melindungi manusia sebagai individu dan bagian dari masyarakat pelaku ekonomi. Dengan pondasi negara hukum, kehidupan perekonomian bangsa diharapkan dapat diarahkan kepada kesejahteraan dan kemajuan bangsa, dimana hukum itu sendiri berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dalam bentuk pemberian kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan-perbuatan ekonomi.²

¹ Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

² Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal. 13.

Seiring berjalannya waktu, industri perbankan sangat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian bangsa,³ dimana hampir seluruh sektor kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan keuangan membutuhkan jasa perbankan. Industri perbankan telah menjadi bagian inti dari lembaga keuangan melalui fungsi intermediernya, yang tercermin dari ciri khas umum kegiatan usahanya yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, baik untuk modal kerja, konsumtif atau investasi. Hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) yang menyebut bahwa, bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴

Tidak semata untuk menjembatani atau memfasilitasi kepentingan pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana pinjaman, tetapi juga bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya.

³ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, 2018, hal 2.

⁴ Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan.

Industri perbankan dari waktu ke waktu menjadi bagian penting siklus perekonomian suatu negara. Terjaganya kesehatan industri perbankan menjadi efek domino yang mendukung pertumbuhan perekonomian rakyat, sebaliknya apabila sistem perbankan goyah dapat berdampak sistemik pada krisis perekonomian negara, yakni mulai dari macetnya sistem pembayaran, kenaikan jumlah kredit bermasalah, sektor riil yang stagnan atau mengalami kemunduran hingga krisis perekonomian negara. Oleh karenanya penting untuk tetap mampu mengendalikan kesehatan sistem perbankan secara konsisten dan berkelanjutan yakni mulai dari penerapan prinsip-prinsip perbankan yang konsisten utamanya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan penegakan huku (*law enforcement*) yang konsisten terhadap regulasi perbankan.

Untuk menopang peran strategis sebagai urat nadi perekonomian negara, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memastikan ketaatan terhadap setiap peraturan di bidang perbankan, yaitu dari UU Perbankan berikut peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah telah membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selain memberi izin, juga mengawasi setiap lembaga keuangan termasuk bank dan bukan bank seperti perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pasar modal dan lainnya. Sebagaimana diketahui, OJK dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan dapat

terselenggara dengan baik dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan OJK dimaksud diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi OJK yang dapat menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor industri keuangan non bank.

Salah satu modal dasar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik adalah adanya kepercayaan (*trust*) dari nasabah, khususnya kepercayaan akan kredibilitas bank dalam menjaga dan mengelola dengan aman dana simpanan yang dipercayakan nasabahnya. Oleh karena itu penting bagi bank memberi bukti keyakinan kepada nasabah, bukan sekedar publikasi atau raihan penghargaan penerapan tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) dari berbagai lembaga penilai.

Sebagai suatu badan hukum, bank diharapkan mampu memberi suatu jaminan moril maupun hukum atas hubungan hukumnya dengan masyarakat atau konsumen yang biasanya diwujudkan dengan perjanjian. Dengan adanya perjanjian membuktikan nasabah menyetujui menyimpan sejumlah dananya di bank atas dasar kepercayaan dan bank mengikatkan diri kepada nasabah melalui kesanggupan menjaga keamanan simpanan nasabahnya. Sebaliknya pula di sisi pinjaman bank akan dibuatkan suatu perjanjian kredit atau pembiayaan yang membuktikan bank percaya akan

kemauan dan kemampuan nasabah peminjam untuk menggunakan dan kelak mengembalikan pinjaman berikut imbal hasil yang diperjanjikan.

Hubungan hukum antara bank dan nasabahnya pada umumnya timbul dari perjanjian diantara mereka, sehingga jika salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hubungan hukum tersebut, maka pihak yang melanggar tersebut wajib menerima konsekuensi yang diakibatkan olehnya. Secara umum, konsekuensi bagi pihak tersebut adalah supaya hubungan hukum dapat dipulihkan kembali atau dipenuhi.⁵

Pada dasarnya, perjanjian⁶ merupakan sebuah peristiwa dimana seorang berjanji kepada pihak atau seseorang lainnya atau dua orang itu saling mengucapkan janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Perjanjian mengakibatkan adanya hubungan perikatan antara dua orang yang membuatnya sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang dapat terbentuk sebagai akibat dari adanya pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lain. Dalam hal demikian, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa disertai paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sepihak.

Bahwa bentuk kesepakatan dapat dituangkan ke dalam perjanjian tertulis atau verbal (lisan). Dalam hal perjanjian dibuat secara verbal, wajib

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal 2.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hal. 6. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

dipahami bahwa pembuktiannya akan lebih sulit dibandingkan apabila dibuat secara tertulis karena pada dasarnya hukum acara perdata atau privat sangat mengakui bukti tertulis sebagai bukti awal. Tidak hanya itu, beban pembuktian menjadi lebih sulit dikarenakan pembuktian adanya kesepakatan secara lisan ini juga sangat sulit untuk dibuktikan bagi pihak yang dirugikan.⁷

Pada dasarnya perikatan adalah lahir karena adanya perjanjian atau dengan kata lain perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Makna “perikatan” atau “*verbinten*”⁸ ini sesungguhnya memiliki arti lebih luas dibandingkan perjanjian oleh karena dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) diatur mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada adanya suatu persetujuan atau perjanjian yaitu untuk perikatan yang timbul dari adanya perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang muncul dari adanya pengurusan kepentingan orang lain yang tidak didasarkan oleh adanya persetujuan (*zaakwaarneming*), akan tetapi, sebagian besar dari Buku III KUHPerdata itu ditujukan pada perikatan-perikatan yang lahir dari persetujuan dan perjanjian.⁹

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata juga mengatur suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu adanya (1) sepakat bagi mereka

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1999), hal. 160.

⁸ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 91.

⁹ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1998, hal. 122.

yang mengikatkan dirin, (2) kecakapan para pihak membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab atau *causa* yang halal.

Kepastian hukum adalah asas bahwa hukum harus jelas atau pasti bagi mereka yang tunduk pada hukum. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁰

Kata "kepastian" berkait erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta-merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹¹

¹⁰ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara *Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

¹¹ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹³

¹² Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

¹³ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁴

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

¹⁴ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-> / Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁵

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam, adalah hubungan hukum yang didasarkan atau bersumber dari perjanjian diantara mereka. Sebagaimana uraian di awal, bahwa timbul dan berjalannya hubungan hukum tersebut pada prinsipnya berlandaskan kepercayaan (*trust relationship*) sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

Terkhusus di bidang dana, industri perbankan memberi alternatif pilihan produk simpanan yang dapat dipilih dan disepakati dengan nasabah, yang jamak ditawarkan antara lain produk tabungan yang dananya dapat ditarik sesewaktu yang dikehendaki nasabah, kemudian simpanan deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan.¹⁶

Pada prinsipnya bank dalam menyimpan dan mengelola dana simpanan nasabah dituntut dan sudah seharusnya berperilaku profesional melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), perumusan dan penerapan standar operasional dan prosedur (SOP) yang baik dalam

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

¹⁶ Muhammad Yusuf, *Bisnis Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007, hal. 98.

melayani nasabah sebagaimana amanat UU Perbankan. Untuk mengawasi pelaksanaannya, Oleh karena itu juga, supervisi dan pengawasan OJK berperan penting, sehingga diharapkan operasional dan layanan bank berjalan efektif dan efisien, sehat serta melindungi kepentingan nasabah sebagaimana seharusnya. Perihal perlindungan nasabah semakin penting mengingat fenomena bahwa sistem penghimpunan dana oleh perbankan¹⁷ dari waktu ke waktu mengandung konsekuensi atau risiko berupa hilangnya dana simpanan nasabah yang ada di bank oleh berbagai sebab.

Bagaimanapun risiko tuntutan atau gugatan ganti rugi oleh nasabah rentan dihadapi bank mengingat posisinya yang menerima kepercayaan sebagai pihak yang menyimpan dana nasabah. Peristiwa hilangnya dana simpanan nasabah di bank seringkali diklaim sebagai bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) sebagai mana amanat UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 22/2023”) dinyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau perbuatan yang bertentangan

¹⁷ Sunan Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi perbankan Syariah*, Zikrul Hikam, Jakarta, 2003, hal. 93. Perbankan konvensional hanya dikenal tiga jenis yakni Giro, Tabungan dan Deposito.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, baik yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mewakili atau bekerja untuk kepentingan PUJK.

Dalam praktik, ketika terjadi pengaduan atau tuntutan nasabah sehubungan hilangnya simpanan nasabah dari rekening di bank maka respon bank pada umumnya beragam, yang ditafsirkan mengindikasikan ketidakpastian standar penyelesaian oleh setiap pelaku industri perbankan.

Untuk kerugian nasabah dengan nominal kecil, bank biasanya memilih segera membayar demi memitigasi risiko reputasi bank di tengah masyarakat konsumen, namun respon bank juga acap kali tidak sesuai harapan nasabah khususnya bagi yang nasabah yang mengalami kerugian dana simpanan dalam jumlah nominal yang relatif besar. Bank pada kesempatan pertama tidak jarang merespon tuntutan ganti rugi dengan penolakan dengan berbagai alasan umum seperti bank mengklaim telah menjalankan transaksi dengan sah sesuai SOP yang berlaku di lingkungan bank tersebut. Dengan kata lain, bank menyampaikan bahwa tidak terdapat kesalahan atau kelalaian bank atau pegawai bank, sehingga tidak ada alasan hukum bagi bank mengganti kerugian nasabah, dan untuk itu bank acap kali menyarankan pihak nasabah, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pihak bank menempuh proses hukum, serta mengajak nasabah menunggu dan menghormati apapun nantinya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan tersebut.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁸

Untuk memahami makna tanggung jawab hukum bank sebagai badan hukum, kita dapat menganalisis berdasarkan teori organ. Teori ini dikemukakan sarjana Jerman bernama Otto von Gierke (1841-1921), dan di negeri Belanda teori ini dianut sarjana L.G.Polano dengan nama ajarannya

¹⁸ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal. 77.

leer der volledige realiteit atau ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu “*eine leiblichgeistige lebenseinheit*”. Badan hukum itu menjadi suatu “*verbandpersonlichkeit*” yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Penelitian ini akan mengkaji beberapa perkara hukum sehubungan dengan tanggung jawab bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya simpanan dana nasabah, yaitu berupa gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan oleh nasabah penyimpan dana pada suatu bank BUMN di bilangan Jakarta.

Kasus pertama ialah sehubungan hilangnya dana simpanan nasabah yang disebabkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dengan kategori karena adanya perbuatan curang (*fraud*) dan keterlibatan oknum pegawai bank, selain juga ditemukan adanya kelalaian nasabah itu sendiri. Bahwa perkara gugatan perdata diajukan salah satu perusahaan asuransi bernama akronim PT AUM melawan salah satu bank BUMN, sebagaimana tertuang pada Putusan Nomor 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Nomor 174/PDT/2019/ PT.DKI jo. Putusan Nomor 1102 K/Pdt/2020 jo. Putusan Nomor 483 PK/PDT/2021.

Berdasarkan kronologis yang dapat dilihat pada pertimbangan putusan majelis hakim yang mengadili perkara *aquo*, bahwa permasalahan antara salah satu bank BUMN dengan nasabah atas nama PT AUM tersebut terdeteksi pertama kali pada tanggal 15 November 2016 yakni ketika PT AUM gagal mencairkan bilyet depositonya pada bank BUMN tersebut. Atas klaim nasabah terhadap rekening depositonya, bank BUMN tersebut kemudian melakukan proses verifikasi dan investigasi, dimana disimpulkan mereka bahwa bilyet deposito yang diserahkan PT AUM untuk dicairkan bank adalah diduga palsu karena bukan merupakan produk resmi dan tidak tercatat dalam registrasi dokumen bank BUMN tersebut.

Perbuatan melawan hukum dimaksud diawali dengan kesepakatan di luar kantor bank untuk menerbitkan rekening deposito antara pengurus PT AUM dengan pihak bank dalam hal ini Kepala Kantor Kas suatu bank BUMN dan seseorang yang mengaku sebagai pegawai marketing bank tersebut yang belakangan diketahui hanyalah oknum eksternal bank. Dimulai dari pertemuan mereka di luar kantor bank dan diakhiri dengan kesepakatan membentuk rekening deposito PT AUM dengan suku bunga tinggi, jauh di atas suku bunga pasar. Nasabah kemudian menyeter sejumlah dana ke suatu rekening yang disebut rekening penampungan yang ditunjuk oleh pegawai bank, untuk selanjutnya akan dibentuk rekening deposito nasabah. Total nominal dana yang ditransfer nasabah ke suatu rekening yang ternyata adalah rekening giro atas nama nasabah yakni senilai Rp 76 miliar.

Faktanya dana nasabah yang sudah masuk ke rekening giro tersebut tidak pernah dipindahkan ke rekening deposito sebagaimana diperjanjikan, tetapi untuk membuktikannya, pegawai dan oknum yang mengaku sebagai pegawai marketing bank tersebut memberikan nasabah beberapa lembar bilyet rekening deposito, yang belakangan diketahui palsu.

Dengan menggunakan instrumen penarikan dana berupa cek atau bilyet giro yang melekat pada rekening giro tersebut, komplotan yang bekerja sama dengan oknum pegawai bank tersebut kemudian secara bertahap menarik dana nasabah. Belakangan dari proses penyidikan pihak Polda Metro Jaya, sempat terjadi proses keluar masuk dana pada rekening giro tersebut karena terdapat pula sejumlah dana yang sempat dikembalikan oleh oknum pegawai bank bersama komplotannya yakni senilai Rp 18 miliar, sehingga jumlah pokok dana nasabah yang belum sempat atau tidak pernah lagi dikembalikan oleh oknum pegawai dan komplotan yang bekerja sama dengannya adalah senilai Rp 58 miliar.

Dalam perkara ini, meski pelaku utama pembobol dana nasabah adalah pihak eksternal bank, tidak dipungkiri bahwa perbuatan *fraud* mereka didukung perbuatan oknum pegawai bank yang menyalahgunakan wewenangnya dengan bekerja sama dan memfasilitasi komplotan tersebut.

Namun selain itu ditemukan juga adanya faktor kelalaian atau kurang hati-hatian nasabah yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi andil dalam proses hilangnya dana nasabah tersebut, seperti percaya begitu saja dengan tawaran suku bunga deposito tinggi yang jauh di atas harga

pasar, dengan dana nasabah yang begitu besar menempatkannya pada suatu *outlet* kecil di bawah kantor cabang yaitu suatu kantor kas yang ternyata tidak pernah dilihatnya.

Setelah PT AUM datang mengklaim pencairan depositonya yang ternyata bodong, pihak bank menyatakan bilyet deposito yang ditangan nasabah adalah palsu dan identitasnya jelas tidak teregistrasi di bank. Pada akhirnya nasabah mendaftarkan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2017 dalam register No. 696/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dengan mendudukkan bank BUMN tersebut sebagai pihak Tergugat, dengan tuntutan materiil senilai Rp 58 miliar dan tuntutan immateriil senilai Rp 320 miliar dengan alasan dampaknya terhadap reputasi bisnis PT AUM. Bahwa perkara ini berjalan dalam waktu yang relatif panjang, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi hingga kasasi dan upaya hukum luar biasa PK (Peninjauan Kembali) di Mahkamah Agung.

Dari perjalanan memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama hingga berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung, bahwa dasar pertimbangan hingga putusan setiap majelis hakim relatif berbeda-beda, seolah-olah menunjukkan betapa relatif minimnya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berkepastian hukum untuk dijadikan pegangan. Adapun posisi putusan pengadilan dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Kasus PT AUM Dengan Bank

Tingkat Peradilan	Putusan	Keterangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor : 696/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst)	Gugatan PT AUM tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard / NO</i>)	Salah satu bank BUMN menang
Bandung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan Nomor : 174/PDT/2019/PT DKI)	Gugatan PT AUM diterima dengan menghukum salah satu bank BUMN membayar kerugian materiil sebesar Rp 58 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 2 miliar	Salah satu bank BUMN kalah
Kasasi Mahkamah Agung (Putusan Nomor : 1102 K/PDT/2020)	Gugatan PT AUM tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard / NO</i>)	Salah satu bank BUMN menang
Peninjauan Kembali /PK Mahkamah Agung (Putusan Nomor : 483 PK/PDT/2021)	Gugatan PT AUM diterima dengan menghukum salah satu bank BUMN membayar kerugian materiil sebesar Rp 58 miliar dan bunga sebesar 6% per tahun sejak gugatan didaftarkan hingga dibayarkannya ganti kerugian kepada PT AUM.	Salah satu bank BUMN kalah

Penelitian kasus yang kedua adalah juga peristiwa hilangnya dana simpanan nasabah dengan faktor penyebab perbuatan melawan hukum. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum diajukan oleh nasabah atas nama

akronim PT AJMI terhadap salah satu bank BUMN. Permasalahan kedua pihak juga berawal dari klaim pencairan rekening simpanan deposito pada tanggal 15 November 2016 yang ditolak oleh bank karena ternyata tidak ada rekening deposito PT AJMI di bank tersebut. Atas pengaduan nasabah, bank melakukan proses verifikasi dan investigasi dan hasilnya bukti bilyet deposito yang ditunjukkan nasabah diduga palsu karena setelah diperiksa bukan merupakan produk resmi bank BUMN tersebut.

Dari hasil penyidikan pihak kepolisian diketahui bahwa dari pertemuan di luar kantor bank, antara pengurus PT AJMI dan pejabat kantor kas bank yang didampingi pegawai bank lainnya yang belakangan diketahui pihak eksternal yang mengaku sebagai pegawai bank. Kedua pihak menyepakati pembentukan rekening deposito dengan imbal bunga jauh di atas suku bunga pasar. Proses selanjutnya, nasabah memasukkan sejumlah dana ke suatu rekening yang ditunjuk pegawai bank, yang ternyata berupa rekening giro dan dari sana dijanjikan akan dipindahkan ke rekening deposito nasabah. Total dana disetor nasabah ke rekening giro ialah senilai Rp 48,5 miliar dan dalam perjalanannya dana nasabah yang sempat dikembalikan oknum komplotan tersebut senilai Rp 13 miliar, sehingga dana PT AJMI yang belum sempat kembali ialah senilai Rp 35,5 miliar.

PT AJMI pada akhirnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Desember 2017 dalam register nomor : 695/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Pst dengan mendudukkan bank sebagai pihak Tergugat, dengan tuntutan materiil sebesar Rp 35.5 miliar dan tuntutan

immateriil sebesar Rp 285 miliar dengan alasan dampak terhadap reputasi bisnis PT AJMI. Bahwa gugatan PT AJMI tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang posisi putusan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Kasus PT AJMI dengan Bank

Tingkat Peradilan	Putusan	Keterangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor : 695/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst)	Gugatan PT AJMI tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard / NO</i>)	Salah satu bank BUMN menang
Bandung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan Nomor : 173/PDT/2019/PT DKI)	Gugatan PT AJMI diterima dengan menghukum salah satu bank BUMN membayar kerugian materiil sebesar RP 35,5 miliar dan kerugian immateriil sebesar Rp 2 miliar	Salah satu bank BUMN kalah
Kasasi Mahkamah Agung (Putusan Nomor : 1510 K/PDT/2020)	Gugatan PT AJMI tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard / NO</i>)	Salah satu bank BUMN menang
Peninjauan Kembali/ PK- Mahkamah Agung (Putusan Nomor : 484 PK/PDT/2021)	Gugatan PT AJMI diterima dengan menghukum bank BUMN membayar kerugian materiil sebesar Rp 35,5 miliar dan bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga dibayarkan ganti kerugian PT AJMI.	Salah satu bank BUMN kalah

Penelitian kasus yang ketiga ialah tuntutan ganti kerugian atas hilangnya dana simpanan nasabah akibat suatu perbuatan melawan hukum, tuntutan mana dari nasabah atas nama akronim PT SANF. Bahwa permasalahan yang terjadi antara PT SANF dengan salah satu bank BUMN yang sama terdeteksi pertama kali pada tanggal 15 November 2016, yakni ketika nasabah yang dibahas di awal yaitu PT AUM dan PT AJMI gagal mencairkan bilyet depositonya di salah satu bank BUMN.

Setelah pengajuan pencairan bilyet deposito oleh PT SANF, bank kemudian melakukan proses verifikasi dan investigasi, disimpulkan bahwa bukti bilyet deposito yang dipegang nasabah diduga palsu karena bukan produk resmi dan tidak tercatat pada sistem bank. Dengan modus operandi yang sama dengan kasus nasabah atas nama PT AUM dan PT AJMI, total dana PT SANF yang sempat masuk ke rekening bank ialah senilai Rp 250 miliar dan dalam perjalanannya, a komplotan pelaku sempat mengembalikan dana ke rekening nasabah sebesar Rp 140 miliar, sehingga jumlah dana yang belum sempat atau tidak pernah lagi dikembalikan oleh komplotan yang bekerja sama dengan oknum pegawai bank ialah senilai Rp 110 miliar.

Setelah proses klaim nasabah ke bank tidak dapat mengembalikan dananya, nasabah akhirnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2017 dengan register perkara nomor : 154/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang mendudukkan salah satu bank BUMN tersebut sebagai pihak Tergugat dengan tuntutan materiil yang diajukan senilai Rp 110 miliar dan diikuti dengan tuntutan immateriil senilai

Rp 45 miliar dengan alasan dampaknya terhadap reputasi bisnis PT SANF. Bahwa gugatan yang diajukan nasabah atas nama PT SANF tersebut memakan waktu relatif lama, dari mulai tingkat pengadilan pertama hingga putusan PK di Mahkamah Agung RI, yang posisi putusannya dapat disimpulkan pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Kasus PT SANF dengan Bank

Tingkat Peradilan	Putusan	Keterangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst)	Gugatan PT SANF tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard / NO</i>)	Salah satu bank BUMN menang
Bandung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Putusan Nomor : 170//PDT/2018/PT DKI)	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan PT SANF tidak dapat diterima	Salah satu bank BUMN menang
Kasasi Mahkamah Agung (Putusan Nomor : 3556 K/PDT/2018)	Menolak gugatan PT SANF untuk seluruhnya	Salah satu bank BUMN menang
Peninjauan Kembali/ PK - Mahkamah Agung (Putusan Nomor : 342 PK/PDT/2020)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membatalkan putusan Kasasi Nomor : 3556 K/PDT/2018 tanggal 30 Januari 2019; ▪ Menyatakan gugatan PT SANF tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijk verklaard / NO</i>). 	Salah satu bank BUMN menang

Dari ketiga kasus yang diteliti tersebut, ditemukan permasalahan kekosongan hingga ketidakpastian pengaturan hukum dan penerapannya, yaitu terkait bagaimana tanggung jawab bank dalam perbuatan melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah. Permasalahan mana terlihat dari pertimbangan hukum dan putusan setiap majelis hakim yang berbeda-beda pada saat terdapat fakta hukum bahwa pelaku, modus, tempat dan waktu kejadian adalah relatif sama.

Diluar putusan pengadilan yang menyatakan gugatan ditolak atau diterima, terdapat putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena pihak yang digugat dinyatakan tidak lengkap atau kurang pihak, meski nyata adanya kerugian nasabah atas kehilangan simpanannya di bank. Tidak hanya dari sisi nasabah, putusan-putusan tersebut juga turut membingungkan pihak bank terutama karena belum adanya suatu parameter standar yang dapat dijadikan pedoman atau preseden bertindak berdasarkan contoh putusan-putusan pengadilan yang menunjukkan suatu kepastian hukum. Dengan kata lain, bank belum mempunyai parameter tentang apa dan bagaimana pertanggungjawaban bank atau juga pedoman tuntunan kepada nasabah ketika terjadi peristiwa perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah, hal mana lebih jauh telah menimbulkan perdebatan dan gejolak mengingat hukum itu harus pasti.

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan secara umum bahwa causa arau penyebab hilangnya dana simpanan nasabah di suatu bank dapat diklasifikasikan atas 4 (empat) kategori yaitu dari faktor :

1. Kegagalan sistem bank (*system error*)
2. Kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi perjanjian oleh intern bank
3. Keterlibatan, kesalahan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh konsumen atau nasabah
4. Perbuatan melawan hukum atau *fraud* dari pihak ketiga.

Masing-masing faktor penyebab hilangnya dana simpanan nasabah dimaksud di atas ada kalanya tidak berdiri sendiri, dimnana bisa karena kombinasi antara dua atau lebih faktor tersebut, misalnya karena perbuatan melawan hukum pegawai bank yang bekerja sama atau berkomplot dengan pihak ketiga atau eksternal bank. Ada kalanya juga hasil kombinasi antara faktor kelalaian nasabah yang membuka kesempatan kepada pihak ketiga melakukan perbuatan melawan hukum membobol rekening simpanan nasabah, dan kombinasi faktor lainnya.

Pertama, faktor kegagalan sistem bank (*system error*), contohnya antara lain adalah kasus perubahan saldo rekening milik beberapa nasabah suatu kantor bank di daerah Kabupaten Karawang. Kegagalan sistem pada bank tersebut terlihat dari kegagalan transaksi nasabah dan terjadinya transaksi berulang-ulang karena berita SMS perintah transfer yang tertunda

(*SMS-delay*) karena protokol SMS tidak memiliki mekanisme untuk menjamin koneksi, kelancaran komunikasi sistem bank tersebut sangat bergantung pada lalu lintas (*traffic*) dan frekwensi transaksi sehingga sering terjadi keterlambatan penyampaian informasi atau perintah transaksi. Selain kegagalan sistem yang berakibat pada berkurangnya saldo nasabah, juga terdapat kasus saldo rekening tertukar antar nasabah seperti yang pernah terjadi di kantor cabang salah satu bank BUMN di Jakarta dimana pihak bank harus melakukan pengembalian dana dan pemblokiran rekening nasabah lainnya karena diduga sempat melakukan penarikan dana atas saldo rekening yang tertukar. Kasus kegagalan sistem yang banyak terjadi adalah kegagalan transaksi pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dimana uang nasabah tidak keluar tetapi saldo rekening nasabah berkurang. Kasus lainnya adalah kegagalan transaksi atau transaksi berulang pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yaitu alat yang digunakan *merchant* yang bekerja sama dengan bank untuk menerima pembayaran konsumen yang berbelanja.

Kedua, yaitu faktor kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi perjanjian oleh intern bank, contoh kasusnya pada tahun 2018 pernah terjadi pada suatu kantor bank BUMN di kawasan Kota Tangerang dimana petugas Teller Service tidak menjalankan tugas kehati-hatian dan prinsip *know your customer* (prinsip mengenal nasabah) ketika seseorang yang terlihat di CCTV datang dengan KTP nasabah yang dipalsukan, berhasil menguras dana dari rekening nasabah dan oknum tersebut tidak diketahui siapa dan keberadaannya sampai saat ini.

Ketiga, yaitu faktor keterlibatan, kesalahan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum oleh konsumen atau nasabah, contoh kasusnya antara lain adalah yang terjadi tahun 2019 di Kota Malang dimana nasabah suatu bank BUMN selalu mempercayakan rekening dan transaksinya dijalankan oleh pegawainya dan akhirnya dana tuannya yang ada di rekening bank dikuras dan disalahgunakan. Nasabah disini jelas melakukan kelalaian karena tidak melakukan kewajiban kehati-hatiannya (*duty of care*). Kasus besar yang pernah terjadi di tahun 2011 pada Citibank Jakarta, oleh Malinda Dee, senior relation managernya, yang memanfaatkan kesalahan dan kelalaian nasabah yang tidak menjalankan *duty of care*-nya dimana para nasabahnya mau begitu saja dimintai tanda tangannya dalam formulir transfer yang masih kosong dan setelah itu Malinda mengisi formulir transfer dengan data palsu hingga isi berita transfer. Kasus lainnya yang sering terjadi adalah nasabah tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang dicantumkan pihak bank dalam formulir pembukaan rekening sehingga nasabah melakukan kesalahan menjalankan transaksi dan merugikannya.

Keempat, yaitu faktor perbuatan melawan hukum atau *fraud* dari pihak ketiga, dengan contoh antara lain kasus pembobolan sejumlah mesin ATM pada tahun 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 2 (dua) warga asing asal Bulgaria dengan modus menggunakan perangkat lunak (*software*) yang dihubungkan melalui laptop komputer ke mesin ATM dan berhasil menyedot uang yang mengalir deras ke tong sampah. Kasus lainnya yang dulu sering terjadi adalah pembobolan ATM oleh eksternal bank dengan

menggunakan teknik *skimming* yaitu pelaku mencuri informasi nasabah dari kartu ATM dengan cara memasang perangkat tambahan pada mesin ATM yang mampu membaca dan merekam data dari magnetik strip kartu ATM nasabah. Kasus besar lain pernah terjadi pada bank syariah terbesar di Indonesia saat ini yaitu serangan siber dari luar bank yang mengakibatkan seluruh layanan bank tersebut tidak dapat digunakan dan lebih dari 15 juta informasi pribadi nasabah dan pegawai diduga bocor, namun sejauh ini belum diketahui kerugian pasti para nasabah.

Menurut Popper, semua teori harus dipandang sebagai proposal untuk mengatasi masalah sebagai langkah dalam pencarian kebenaran yang lebih benar, dan dengan demikian selalu merupakan pernyataan sementara mengenai tingkat kekeliruan yang diketahui. Suatu teori hukum berusaha untuk menetapkan arah perkembangan hukum dan mengembangkan sistem-sistem norma masyarakat sesuai dengan perkembangan yang dijalani masyarakat. Para penyusun teori hukum itu biasanya mulai dengan menilai keadaan sosial, mengajukan kritik terhadapnya, untuk kemudian menawarkan bagaimana wujud seharusnya suatu sistem hukum supaya keadaan sosial yang mereka lihat itu menjadi lebih baik. Suatu teori hukum seperti juga teori-teori lain, cenderung untuk mengusulkan sesuatu. Teori hukum, dengan demikian bisa saja saling menunjang, saling berlawanan atau saling bertindihan.¹⁹

¹⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Penberit Prama Widya, Bandung, 2016, hal. 49- 50.

Oleh karena itu, pisau analisis yang menurut hemat penulis relevan digunakan dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum, teori perjanjian dan teori pertanggungjawaban korporasi yang didalamnya juga akan beririsan dengan pembahasan mengenai teori organ atau dikenal juga dengan teori badan hukum yang berkaitan dengan UU Perbankan. Dalam proses analisis tersebut, peneliti juga akan mengkaji permasalahan ketidakpastian hukum lainnya dan juga solusi serta kerangka hukum yang ideal untuk mengatasi permasalahan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan penulis, maka judul penelitian dalam disertasi ini adalah : **Tanggung Jawab Bank Dalam Perbuatan Melawan Hukum Terkait Hilangnya Dana Simpanan Nasabah.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian Disertasi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah?
2. Bagaimana pelaksanaan aturan pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah?
3. Bagaimana kerangka hukum ideal pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah.
2. Untuk mengkaji penerapan/pelaksanaan aturan pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah.
3. Untuk mengkaji dan merumuskan kerangka hukum yang ideal tentang pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perbankan. Selain itu diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur yang menelaah tentang bagaimana pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana

simpanan nasabah. Manfaat lainnya adalah untuk menambah wawasan baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya.

2. Manfaat Secara Praktis

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik khususnya di bidang perbankan yang dapat memperluas wawasan para mahasiswa atau peneliti lainnya serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis penelitian ini berguna:

- a) Sebagai penunjuk praktis pentingnya pembaharuan hukum di Indonesia khususnya hukum perbankan.
- b) Sebagai masukan bagi Pemerintah selaku pemegang otoritas yang berwenang membuat peraturan hukum dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum.

1.5. Keaslian Penelitian / Orisinalitas

Adapun penelitian terdahulu adalah:

1. Dari Wilhelmus Renyaan dengan judul penelitian *Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar 2017.²⁰ Kesimpulan hasil penelitiannya adalah kedudukan hukum mediasi perbankan dalam

²⁰ Wilhelmus Renyaan, *Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2017.

penyelesaian sengketa non litigasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan aturan hukum tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara efektif hal mana disebabkan belum terbukanya informasi dari pihak Bank Indonesia terhadap nasabah menyangkut penyelesaian pengaduan maupun kewenangan nasabah dalam kaitannya dengan mediasi perbankan. Disamping itu, pelaksanaan mediasi perbankan dapat dilaksanakan apabila memiliki unit atau lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa dan konflik antara nasabah dengan pihak bank, kemudian terkait dengan pelaksanaan putusan hukum antara para pihak yang bermasalah, maka perlu adanya kesepakatan perdamaian yang jelas, yang mengikat kedua belah pihak, baik itu nasabah maupun pihak bank, karena kesepakatan yang terjadi antara para pihak yaitu kesepakatan berdasarkan itikad baik yang bisa saja salah satu pihak tidak setuju.

2. Dari Herwastoeti dengan judul penelitian *Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif (Substantive Justice)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019.²¹ Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat faktor ketidakpastian hukum dalam penyelesaian

²¹ Herwastoeti, *Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Substantif (Substantive Justice)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2019.

sengketa perbankan dimana ada 3 (tiga) faktor jika dianalisis berdasar teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman.

a. Substansi hukum, yakni ada kelemahan dari UU OJK, UU Perlindungan Konsumen maupun Peraturan OJK terkait.

b. Struktur hukum, yakni belum terbentuknya LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) di daerah sehingga dalam upaya penyelesaian sengketa perbankan secara non litigasi maka konsumen membawa ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang mana BPSK dalam memeriksa pengaduan konsumen seringkali melanggar norma dan asas hukum, misalnya membatalkan perjanjian, tetap memeriksa dan memutuskan sengketa antara konsumen dan bank walaupun lembaga perbankan tidak hadir sehingga kemudian bank mengajukan keberataan di Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung yang hasilnya putusan BPSK seringkali dibatalkan oleh pengadilan dimana BPSK dianggap tidak berwenang menangani perkara (kompetensi absolut). Selain itu OJK dianggap kurang optimal dalam pengawasan yaitu sebagaimana diketahui struktur organisasi OJK terbatas di daerah, khususnya terkait struktur perlindungan konsumen, dan juga pengawasan operasional bank masih menjadi satu masalah dan laporan dari bank ke OJK hanya formalitas belaka.

- c. Budaya hukum, dalam pengertian pemahaman konsumen terhadap hak-hak konsumen maupun penyelesaian non litigasi relatif sangat kurang, hal ini karena program dan kebijakan OJK hanya terfokus pada layanan dan produk perbankan saja.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka dipandang perlu dilakukan rekonstruksi yang ideal, yaitu dengan melakukan:

- a. Pembaharuan hukum (*law reform*) pada substansi hukum (*legal substance*) dengan melakukan penguatan terhadap PERMA No. 2 Tahun 2005 (Litigasi) dan melakukan langkah revisi terhadap ketentuan POJK No. 01/POJK.07/2014 (Non-Litigasi);
- b. Memberdayakan eksistensi struktur hukum (*legal structur*), yaitu secara non litigasi melalui pembentukan LAPSPI di daerah dan agar pengawasan oleh OJK lebih optimal;
- c. Membangun budaya hukum (*legal culture*) melalui edukasi dan sosialisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*).

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut pada dasarnya adalah relatif sangat berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, yang mana penulis memfokuskan dengan spesifik mengenai tanggung jawab bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah. Adapun faktor persamaan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa kesemua penelitian bersama-sama mengkaji mengenai huku di bidang perbankan.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam disertasi ini secara garis besar tersusun atas materi-materi yang dimuat dalam bab demi bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama berisi Pendahuluan yang merupakan gambaran atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas / keaslian penulisan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi mengenai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup Teori Kepastian Hukum, Teori Perjanjian dan Teori Tanggung Jawab Korporasi.

Bab Ketiga berisi Metode Penelitian yang memaparkan tentang bentuk penelitian, jenis data, teknik pengumpulan atau cara perolehan data, dan analisa data.

Bab Keempat berisi Hasil Penelitian dan Analisis, dimana dalam bab ini akan dipaparkan mengenai pengaturan pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah, bagaimana penerapan/pelaksanaan pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah, dan bagaimana idealnya pengaturan pertanggungjawaban bank dalam perbuatan melawan hukum terkait hilangnya dana simpanan nasabah.

Bab Kelima merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.